

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan ekonomi adalah sebuah proses dinamis yang merupakan satu kesatuan kegiatan dalam berbagai aspek kehidupan manusia yaitu meliputi aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Ketiga aspek kehidupan manusia tersebut saling berkaitan satu sama lain, dimana apabila salah satunya tidak dapat terpenuhi, maka kegiatan pembangunan menjadi tidak seimbang.

Indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah bisa dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi, karena semakin bertambahnya penduduk maka dibutuhkan pula penambahan pendapatan setiap tahunnya.

Oxfam (2017), dalam hasil surveynya menyebutkan bahwa, meski terjadi pertumbuhan ekonomi namun tidak mampu mengurangi ketimpangan. Beberapa ahli ekonomi berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi saja belum cukup untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi biasanya hanya mementingkan pertumbuhan *Gross Domestic Product* (GDP) suatu negara tetapi kurang memerhatikan masalah penyerapan tenaga kerja, pengurangan kemiskinan dan

pemerataan pendapatan. Dapat diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin semua masyarakat menerima manfaat yang sama. Hal ini sejalan dengan laporan W. Bank (2007), dimana pertumbuhan ekonomi dalam satu decade terakhir hanya menguntungkan 20 persen orang terkaya di Indonesia.

Perekonomian Indonesia seharusnya tidak hanya tumbuh dari sisi kuantitas, namun juga dari sisi kualitas. Maka dari itu pertumbuhan ekonomi yang ekspansif diharapkan menjadi pendorong pembangunan inklusif yaitu pembangunan yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, dan kesenjangan. Pertumbuhan ekonomi inklusif diawali dengan pembangunan ekonomi yang inklusif. Hal ini senada dengan pendapat Ali, I., & Son (2007), yang menyatakan bahwa pertumbuhan inklusif memastikan kesempatan yang sama (kesetaraan akses pendidikan dan kesehatan) untuk semua lapisan masyarakat, khususnya yang miskin.

Pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Sejalan dengan pilar kedua dari pembangunan ekonomi yaitu pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan dimana terdiri dari ketimpangan dan kemiskinan.

Credit Suisse sebagaimana dikutip dari Katadata (2017), mencatat bahwa 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 49 persen kekayaan nasional. Sementara, 10 persen orang terkaya menguasai 77 persen total kekayaan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan tidak hanya terkait pendapatan dan

kekayaan namun juga berhubungan dengan ketimpangan kesempatan seperti akses pendidikan dan kesehatan.

Manfaat dari pertumbuhan ekonomi lebih dinikmati oleh 20% masyarakat terkaya. Sementara sekitar 80% penduduk, lebih dari 205 juta orang terlihat merasa masih tertinggal (WorldBank, 2015). Kemudian hasil survei lain yang dipaparkan oleh Oxfam International pada Januari 2017, hasil riset tersebut menyatakan bahwa Indonesia berada pada peringkat keenam dalam kategori ketimpangan distribusi kekayaan terburuk di dunia. Selain itu Oxfam dalam laporannya menyatakan bahwa delapan orang terkaya memiliki kekayaan penduduk bumi, selama 15 tahun menunjukkan konsentrasi kekayaan di Indonesia dengan kelompok ultrakaya semakin bertambah kekayaannya (Oxfam, 2017).

Seperti yang dilansir oleh CNBC Indonesia (2018), fenomena yang tengah diperbincangkan mengenai orang-orang yang super kaya atau *crazy rich* memang menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Forbes telah mengidentifikasi 19 orang dengan nilai kekayaan terbesar di Indonesia. Dimana nilai total kekayaan dari 19 orang tersebut mencapai US\$72,5 miliar atau Rp 1.073 triliun. Angka ini merupakan setengah dari total belanja Negara Indonesia di tahun 2018 yang berjumlah Rp 2.204,4 triliun. Di saat yang sama, terjadi fenomena kemiskinan dalam yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Terbaru, 3 warga meninggal dunia di pegunungan Maluku tengah akibat busung lapar. Tentunya permasalahan ketimpangan menjadi masalah pelik yang belum terselesaikan hingga saat ini.

Berdasarkan data BPS (2015), desa di seluruh Indonesia berjumlah 80.714. dari jumlah tersebut sebagian terbesar ada di Jawa (25.321) dan Sumatera

(25.110). Sisa di seluruh Indonesia Timur hanya 30.283 desa. Dengan jumlah desa yang timpang, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (2015), dari total dana desa sebesar 20,7 triliun, sebagian terbesar dialokasikan untuk desa di Jawa (6,6 triliun lebih) dan Sumatera (6,2 triliun). Sementara itu Indonesia Timur sisanya hanya memperoleh dana desa sebesar 7 triliun, bahkan Kalimantan yang luas dan kaya akan sumber daya alam hanya memperoleh 1,8 triliun dana desa. Hal ini tentunya yang menyebabkan ketimpangan Indonesia Timur dan Barat semakin lebar.

**Gambar I.1 Rasio Gini Indonesia tahun (2010-2018)**



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)

Data diatas menunjukkan bahwa secara nasional rasio gini Indonesia selama periode 2010-2014 mengalami fluktuasi, dengan rasio gini mencapai angka tertingginya di angka 0,414 pada September 2014. Namun pada Maret 2015 hingga Maret 2018, nilainya secara konsisten mulai menurun. Rasio gini di tingkat perkotaan secara konsisten menurun hingga mencapai 0,401 di Maret 2018. Namun sejak September 2016, rasio gini di pedesaan terus merangkak naik hingga menyentuh angka 0,324 pada Maret 2018.

Namun Berdasarkan laporan survey ketimpangan 2017 yang dirilis *International NGO Forum on Indonesian Development* (INFID), indeks ketimpangan pada tahun 2017 adalah 5,6. Angka tersebut justru mengalami peningkatan dari indeks ketimpangan sosial pada tahun 2016 yang sebesar 4,4. Dalam laporan INFID ketimpangan terbesar yang terjadi ialah pada ketimpangan penghasilan sebesar (71,1%), dan kesempatan kerja (62,6%). Ada 10 indikator yang dijadikan INFID sebagai sumber ketimpangan, yaitu penghasilan, pekerjaan, tempat tinggal, harta benda, kesejahteraan keluarga, pendidikan, lingkungan tempat tinggal, keterlibatan politik, hukum, dan kesehatan.

Melebarnya ketimpangan akan meningkatkan resiko kesehatan masyarakat, seperti rentannya warga terhadap penyakit yang menyerang fisik dan mental, serta meningkatnya kekerasan yang berdampak pada seluruh masyarakat.

Selain penghasilan dan pekerjaan, ketimpangan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki juga cukup tinggi. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh INFID sebanyak 45 persen responden menilai ketimpangan itu nyata. Persepsi warga terhadap ketimpangan gender mengalami peningkatan dibandingkan dengan pada tahun 2016 yang sebesar 31 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar terhadap wacana kesetaraan gender dari berbagai diskriminasi dalam hal gender.

Berbagai upaya pembangunan nasional yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia, baik perempuan maupun laki-laki, ternyata belum memberikan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki. Hal ini tidak saja berarti bahwa hak-hak perempuan untuk memperoleh manfaat secara optimal dari pembangunan

belum terpenuhi, tetapi juga karena masih belum dimanfaatkan kapasitas perempuan, sebagai sumber daya manusia, secara optimal. Sementara itu, kesetaraan dan keadilan gender belum sepenuhnya dapat diwujudkan di segala bidang karena masih kuatnya pengaruh nilai sosial budaya yang patriarki, yang menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara.

Menurut UN Women (2016), persoalan kesetaraan gender tidak hanya terjadi di satu daerah atau wilayah, tetapi juga berlangsung hampir di setiap bagian dunia, termasuk di negara-negara di wilayah Asia Pasifik. Meskipun memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat kuat, kemajuan perempuan dalam partisipasi ekonomi di kawasan Asia Pasifik sangat lambat selama 20 tahun terakhir. UN Women (2016), menyatakan bahwa jika kondisi seperti ini masih terjadi, maka untuk mencapai kesetaraan gender antara pria dan wanita di Asia-Pasifik membutuhkan waktu 118 tahun.

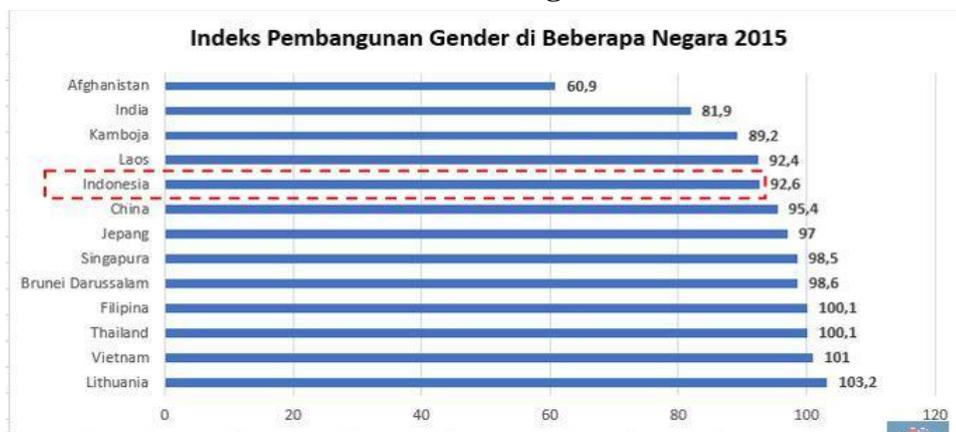
Kesetaraan dan keadilan gender merupakan komitmen yang disepakati negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB pada September 2015 meluncurkan program pembangunan berkelanjutan yang disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk menggantikan program sebelumnya yaitu *Millenium Development Goals* (MDGs) yang sudah berakhir pada tahun 2015 (BPS, 2015). SDGs sendiri memiliki 17 program yang berlaku bagi semua negara, dan termasuk salah satunya yaitu Indonesia. Isu gender masuk dalam agenda pembangunan tujuan 5. Isi tujuan tersebut diantaranya mencapai kesetaraan

gender, memberdayakan perempuan, dan mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.

Di Indonesia, isu kesetaraan gender juga tertuang dalam visi pembangunan nasional, yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa adil berarti tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik individu, wilayah, maupun jenis kelamin. Penghapusan diskriminasi gender di semua bidang kemudian menjadi isu yang terus menerus dibahas sebagai target pembangunan.

Dalam RPJMN 2014-2019 Bappenas (2014), perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan sangat ditekankan. Kesetaraan dalam pembangunan tersebut tidak lain untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pembangunan yang berkelanjutan. Target pembangunan dalam hal kesetaraan gender adalah peningkatan kualitas hidup perempuan, peningkatan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan, pengintegrasian perspektif gender di semua tahapan pembangunan, dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, baik di tingkat pusat maupun daerah. United Nations Development Programme (UNDP) memperkenalkan sebuah ukuran yaitu indeks pembangunan gender (IPG). IPG diformulasikan sebagai rasio antara IPM perempuan dan IPM laki-laki. Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dengan perempuan.

**Gambar I. 2 Indeks Pembangunan Gender 2015**



Sumber : UNDP, diolah oleh Tim Riset CNBC Indonesia

Berdasarkan Human Development Report (2016), secara global IPG mencapai angka 93,8 pada 2015. Hal ini mengindikasikan pembangunan perempuan lebih cepat dari laki-laki. IPG tertinggi di dunia diraih oleh Lithuania sebesar 103,2 yang menunjukkan kualitas pembangunan perempuan di Lithuania lebih baik dibandingkan laki-laki. Sementara posisi terendah ditempati oleh Afghanistan sebesar 60,9. Sedangkan IPG Indonesia sebesar 92,6 masih dibawah Brunei Darussalam dan, Filipina, dan Thailand. Nilai Indonesia bahkan masih dibawah nilai rata-rata global yang sebesar 93,8.

**Gambar I.3 Global Gender Gap Index Indonesia**



Sumber : Global Gender Gap Report 2017

Dalam laporan The Global Gender Gap Report (2017), peringkat Indonesia berada di urutan 84 dari 144 negara. Sedangkan pada tingkat ASEAN Indonesia berada di peringkat enam dengan indeks sebesar 0,691. Indonesia kalah dengan negara Filipina yang berada dipuncak dengan skor 0,790. Filipina mampu menyusul Vietnam yang pada tahun 2015 Vietnam lebih unggul dibandingkan Filipina. Meskipun kalah dengan negara lain, indeks yang Indonesia capai kini mengalami peningkatan indeks. Tahun 2008 indeks sebesar 0,647 menjadi 0,661 pada 2013. Namun terlihat bahwa perkembangan Indeks Gender di Indonesia meningkat dengan lambat.

Laporan terbaru Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum – WEF), menjelaskan memang ada beberapa perbaikan dalam pengupahan pekerja perempuan selama 2018 dibanding tahun 2017, namun secara keseluruhan kesenjangan gender makin besar. Dengan perkembangan saat ini, kesenjangan gender di berbagai sektor secara global tidak akan terjembatani sampai 108 tahun ke depan. Bahkan di dunia kerja dibutuhkan 202 tahun untuk menutup kesenjangan itu. Sekalipun banyak upaya dilakukan dalam beberapa tahun terakhir di bidang pendidikan, kesehatan dan partisipasi politik, tahun ini tercatat kemunduran di ketiga bidang itu, hanya di bidang peluang ekonomi kesenjangan gender agak dipersempit.

Dalam laporan Organisasi Buruh Dunia atau International Labor Organization ILO Report (2000), Dini menyampaikan kesempatan perempuan berpartisipasi di pasar tenaga kerja sektor formal 27 persen lebih rendah dari laki-laki. BPS (2017), Ketimpangan gender juga terjadi pada hasil pemilu 2014-2019 dimana presentase

anggota parlemen perempuan hanya mencapai 17,32 persen, tentunya masih kurang dari target yang ditetapkan yaitu sebesar minimal 30 persen. Menurut survei *Women's Health and Life Experiences* pada 2016, satu dari tiga perempuan Indonesia yang berusia 15-64 tahun mengaku pernah mengalami kekerasan fisik dan seksual.

Kemen PPPA (2019), menyampaikan kasus kekerasan terhadap perempuan yang telah dihimpun oleh komnas perempuan. Bahwa terdapat 5509 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan terjadi sepanjang tahun 2018, sebanyak 3230 kasus merupakan kasus pemerkosaan. Dengan banyaknya kasus kekerasan yang terjadi pasti juga memberikan dampak yang sangat besar tidak hanya pada korban dari fisik dan psikisnya namun juga berdampak pada keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini pula Kemen PPPA menyampaikan, terdapat sekitar 70 juta perempuan dan anak di Indonesia mengalami kekerasan namun hanya 0,01 persen yang sudah melapor dan mendapat pelayanan.

Ketimpangan pendidikan juga dirasakan oleh penduduk satu daerah dengan daerah lainnya, misalnya antara Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Papua. Sesuai dengan data Pembangunan Manusia Berbasis gender 2017, Jakarta pada tahun 2016 menjadi provinsi dengan rata-rata penduduknya bersekolah paling lama baik perempuan maupun laki-laki. Rata-rata lama sekolah perempuan di Jakarta mencapai 10,42 tahun, atau mengenyam pendidikan hingga kelas 11 SMA dan laki-laki mencapai 11,34 tahun atau hingga kelas 12 SMA. Jika dibandingkan dengan Provinsi Papua, Papua menjadi provinsi dengan rata-rata lama sekolah paling rendah, baik laki-laki maupun perempuan. Rata-rata perempuan di Papua

hanya mengenyam pendidikan selama 5,32 tahun atau tidak menamatkan sekolah dasar (SD), sedangkan penduduk laki-laki kondisinya sedikit lebih baik dengan bersekolah selama 6,90 tahun atau minimal menamatkan SMP. Capaian tersebut bahkan lebih rendah dari angka rata-rata lama sekolah secara nasional.

Perbedaan capaian rata-rata lama sekolah antara laki-laki dan perempuan dipengaruhi banyak faktor yang saling terkait, salah satunya adalah budaya. Budaya patriarki yang masih kuat di Indonesia menyebabkan anak perempuan lebih dikesampingkan untuk mendapatkan pendidikan dibandingkan anak laki-laki. Meski demikian, setidaknya perempuan semakin sadar untuk mengakses pendidikan dan bersekolah, yang ditunjukkan dari angka rata-rata lama sekolah pada perempuan tahun 2016 meningkat sebesar 2,04 dari tahun sebelumnya.

McKinsey (2018), mengungkapkan adanya kaitan kesejahteraan dan kemajuan perempuan dalam dunia kerja dengan pembangunan ekonomi. Dapat diartikan bahwa semakin sejahtera suatu negara, maka tingkat paritas gender harus ditingkatkan. Karena salah satu faktor penentu daya saing suatu negara ialah kualitas sumber daya manusia, baik dalam hal kemampuan, *skill*, maupun produktivitasnya. Sejalan dengan paradig yang dikemukakan oleh Anand (1993), menyatakan bahwa pendekatan pembangunan manusia berkaitan dengan ide dasar pembangunan, yaitu memajukan kekayaan kehidupan manusia, bukan kekayaan ekonomi. Meningkatnya pendapatan dan peningkatan output bukan merupakan satu-satunya hasil dari pembangunan. Kebebasan bergantung pada faktor sosial ekonomi seperti akses pada pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan politik.

Dengan komitmen dan penanganan dari pemerintah dalam meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang menempatkan kesetaraan gender menjadi isu strategis yang harus mainstreaming.. Maka dari itu, perlu penanganan yang serius dari pemerintah untuk menciptakan kesetaraan gender yang bertujuan untuk tercapainya kesamaan akses antara laki-laki dengan perempuan dalam mengambil keputusan, keterlibatan dalam berbagai aspek kehidupan baik dalam lingkup publik maupun domestic.

Untuk mengevaluasi sejauh mana kesetaraan dan pemberdayaan perempuan sudah tercapai atau belum, dapat dilihat dari data-data terpilah gender. Indikator-indikator yang menunjukkan capaian-capaian pembangunan berbasis gender akan memberikan gambaran yang nyata tentang pengarusutamaan gender di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berkaitan dengan potret *gender gap* dalam ketimpangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan politik di Indonesia.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana *Gender Gap* dalam ketimpangan ekonomi di Indonesia
2. Bagaimana *Gender Gap* dalam ketimpangan pendidikan di Indonesia
3. Bagaimana *Gender Gap* dalam ketimpangan kesehatan di Indonesia
4. Bagaimana *Gender Gap* dalam ketimpangan politik di Indonesia

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui potret *Gender Gap* dalam ketimpangan ekonomi di Indonesia
2. Untuk mengetahui potret *Gender Gap* dalam ketimpangan pendidikan di Indonesia
3. Untuk mengetahui potret *Gender Gap* dalam ketimpangan kesehatan di Indonesia
4. Untuk mengetahui potret *Gender Gap* dalam ketimpangan politik di Indonesia

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat Berdasarkan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah referensi khasanah ilmu yang berkaitan dengan judul yang diteliti, khususnya analisis gender gap dalam ketimpangan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan politik di Indonesia. Sehingga, penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan semua pihak. Pihak-pihak yang terkait bukan hanya pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini tetapi juga pihak diluar lingkup penelitian.

## **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak yang berkaitan, yakni sebagai berikut :

### **1. Bagi Peneliti**

Dengan adanya penelitian ini penulis dapat mengaplikasikan pengetahuan yang telah dimiliki dalam kegiatan penelitian serta menambah pengetahuan dan wawasan baru bagi peneliti.

### **2. Bagi Universitas Negeri Jakarta**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbang saran dalam mengembangkan ilmu pendidikan ekonomi dan tambahan referensi dalam penelitian yang akan diadakan selanjutnya bagi civitas Universitas Negeri Jakarta.

### **3. Bagi Pemerintah**

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi, kajian atau masukan bagi pemerintah terhadap potret gender gap dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan politik

### **4. Bagi Masyarakat Umum**

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dan dapat menambah pengetahuan wawasan masyarakat terhadap kesetaraan gender di Indonesia.